



Republik Indonesia

RAPAT KERJA BADAN ANGGARAN DPR-RI

DENGAN MENTERI KEUANGAN

DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT I / PEMBAHASAN

RUU TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN

TAHUN ANGGARAN 2017



Jakarta, 17 Juli 2018

DASAR HUKUM PENYAMPAIAN RUU P2 APBN TA 2017

01

**UU 17 Tahun 2003
tentang
Keuangan Negara**

02

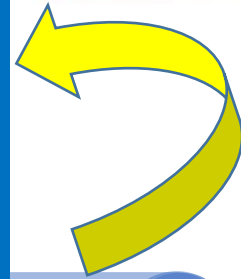
**UU 18 Tahun 2016
tentang APBN TA 2017
sebagaimana telah diubah
dengan UU 8 Tahun 2017**

PERKEMBANGAN PEMBAHASAN RUU P2 APBN TA 2017

LKPP TAHUN
2017

Agenda selanjutnya:

- Rapat Panja Perumus Kesimpulan , **19 Juli 2018**
- Rapat Panja Draft, **20 Juli 2018**
- Raker Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan : Laporan Panja, Pandangan mini fraksi, penandatanganan naskah RUU, **25 Juli 2018**
- Rapat Paripurna : Pembicaraan Tk. II/ Pengambilan keputusan, **26 Juli 2018**



Penyampaian Pandangan
Fraksi DPR RI atas RUU P2
APBN TA 2017 pada rapat
paripurna DPR-RI

17 Juli 2018

Pemerintah menyampaikan
Pokok-Pokok RUU P2 APBN
TA 2017 pada Rapat
Paripurna DPR-RI

10 Juli 2018

3 Juli 2018

26 Juni 2018

Penyampaian naskah
RUU P2 APBN TA
2017 melalui Surat
Presiden RI Nomor
R-32/Pres/06/2018

Penyampaian
tanggapan Pemerintah
atas pandangan fraksi
DPR-RI pada Rapat
Paripurna DPR-RI dan
Raker Banggar
Penyampaian Pokok-
Pokok RUU dan
Pembentukan Panja

SUBSTANSI RUU P2 APBN TA 2017

Substansi RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2017 adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2017 yang telah diperiksa oleh BPK RI.



OPINI PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LKPP 2017

LKPP TAHUN
2017

BPK memberikan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas LKPP Tahun 2017.



Opini WTP:

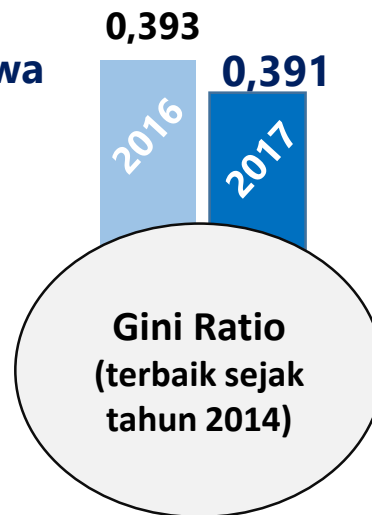
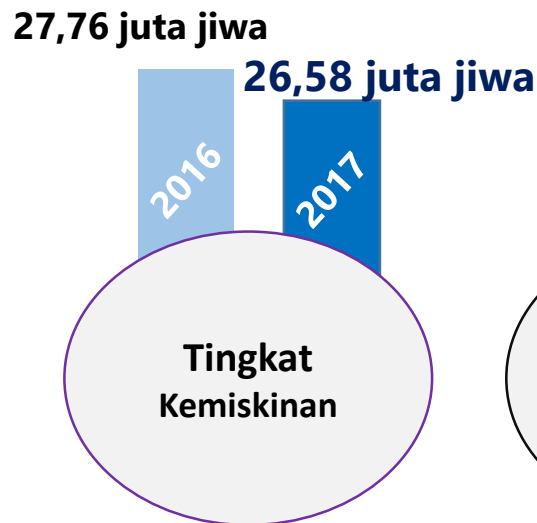
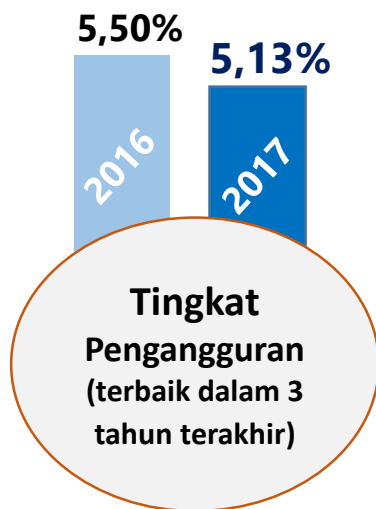
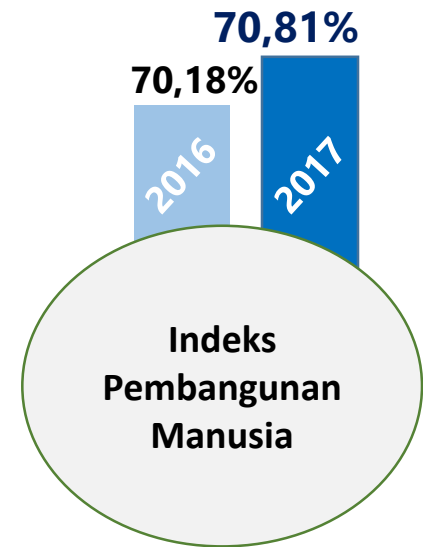
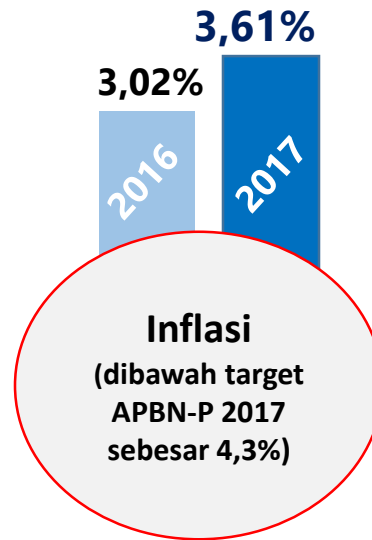
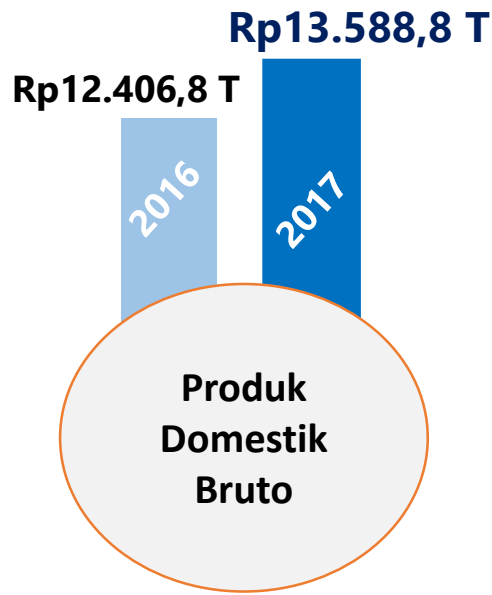
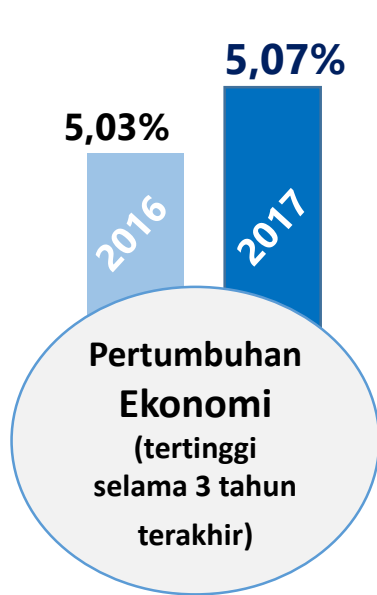
- Penilaian terbaik dari BPK atas laporan keuangan.
- Semua komponen laporan keuangan (angka dan penjelasan) sudah wajar/sesuai ketentuan, atas semua hal signifikan dalam laporan keuangan.

Dalam kurun waktu 2014-2017, pelaksanaan APBN dan perekonomian nasional menunjukkan capaian-capaian positif yang terus membaik, sehingga tahun 2017 merupakan tahun terbaik pelaksanaan APBN.



CAPAIAN EKONOMI PADA 2017

LKPP TAHUN 2017



Rp13.384/USD



- Laporan World Bank 2018: **peringkat *ease of doing business* naik** menjadi posisi 72 dari sebelumnya 91 pada 2016.
- Indonesia menjadi **"*Top 10 Reformer*"** dalam melakukan reformasi tingkat kemudahan berusaha selama 15 tahun terakhir.
- Sejalan dengan perbaikan *rating* utang Indonesia menjadi ***investment grade*** oleh lima lembaga rating tingkat dunia: S&P, Moody's, Fitch, JCR, dan R&I.



LKPP TA 2017 terdiri dari 7 Komponen, yaitu:

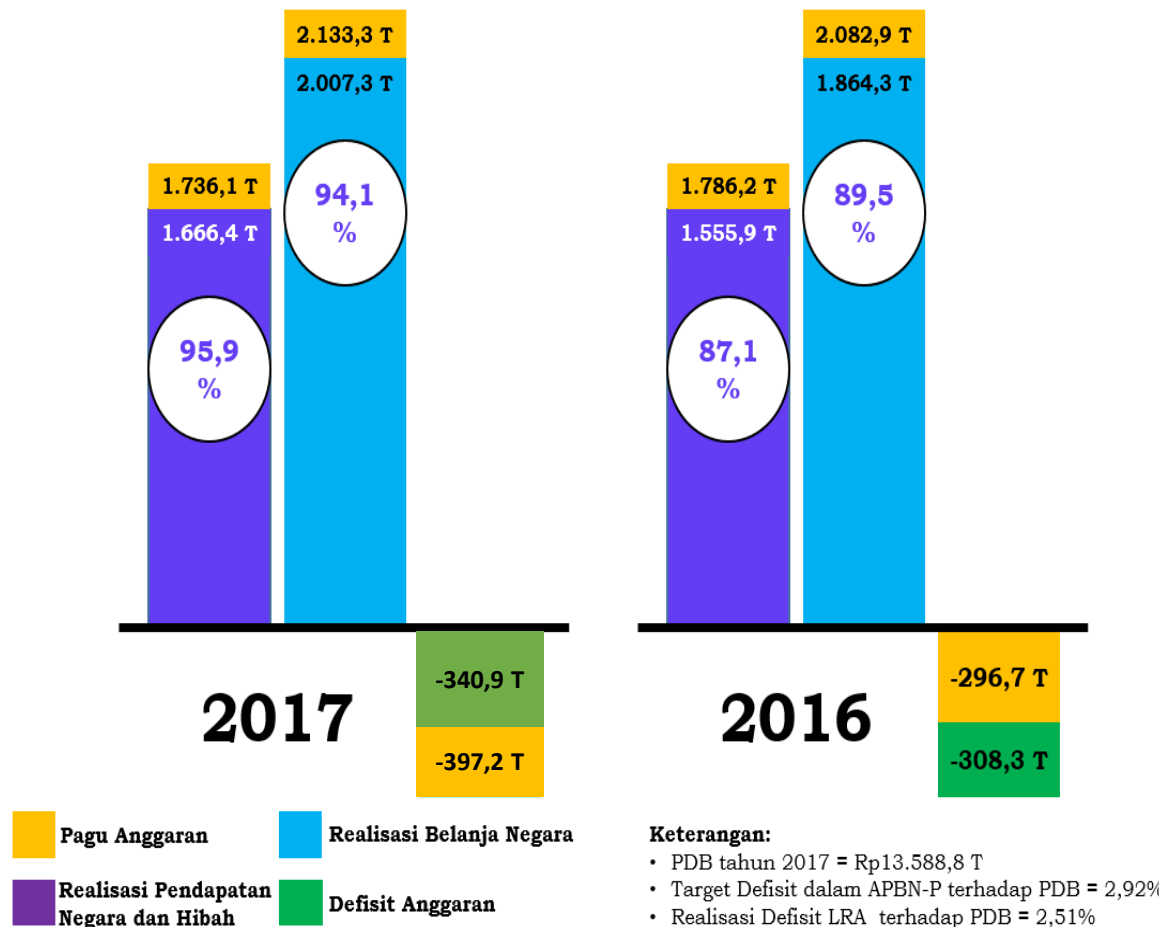
1. Laporan Realisasi APBN (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

LAPORAN REALISASI APBN (LRA)

LKPP TAHUN
2017

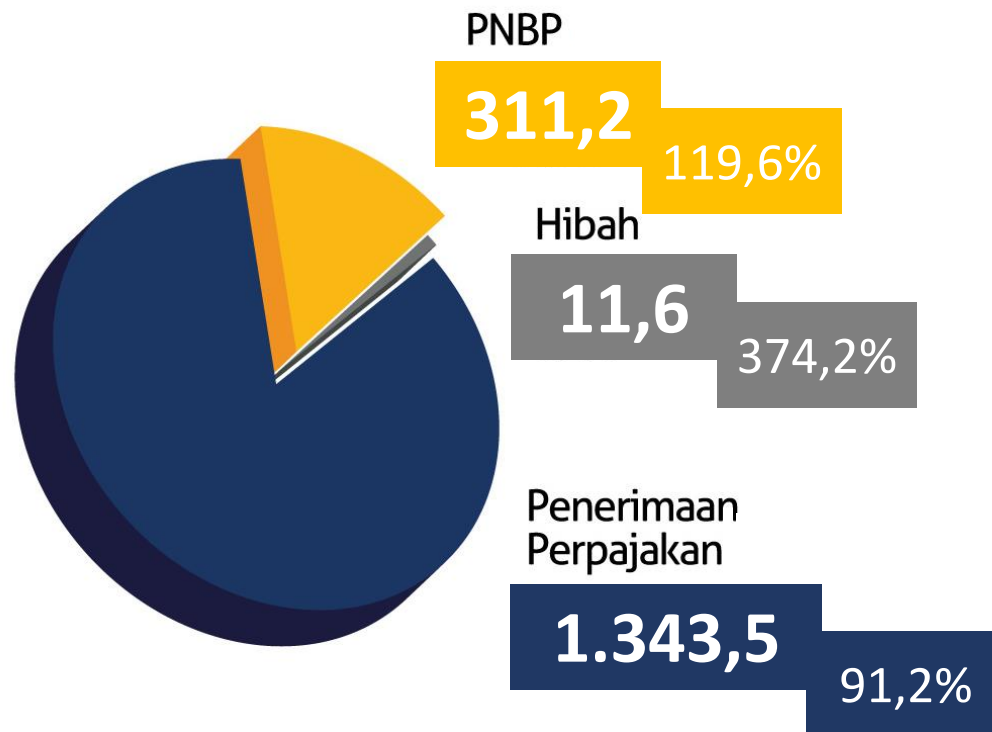
REALISASI PENDAPATAN

1. Pendapatan meningkat Rp110,4 T (7,1%) dibandingkan TA 2016.
2. Pendapatan terdiri dari Perpajakan sebesar Rp1.343,5 T, PNPB sebesar Rp311,2 T dan Hibah sebesar Rp11,6 T.
3. Realisasi pajak tertinggi dalam 3 tahun terakhir.
4. Peningkatan perpajakan dipengaruhi membaiknya harga ICP, aktivitas ekonomi domestik dan aktivitas perdagangan internasional.
5. Peningkatan PNPB dipengaruhi membaiknya harga komoditas pertambangan (minyak mentah dan batu bara), kinerja BUMN dan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU.



Total Realisasi Pendapatan Negara: 1.666,4 (95,9%)

**Proporsi
Pendapatan Negara**
(dalam Triliun)

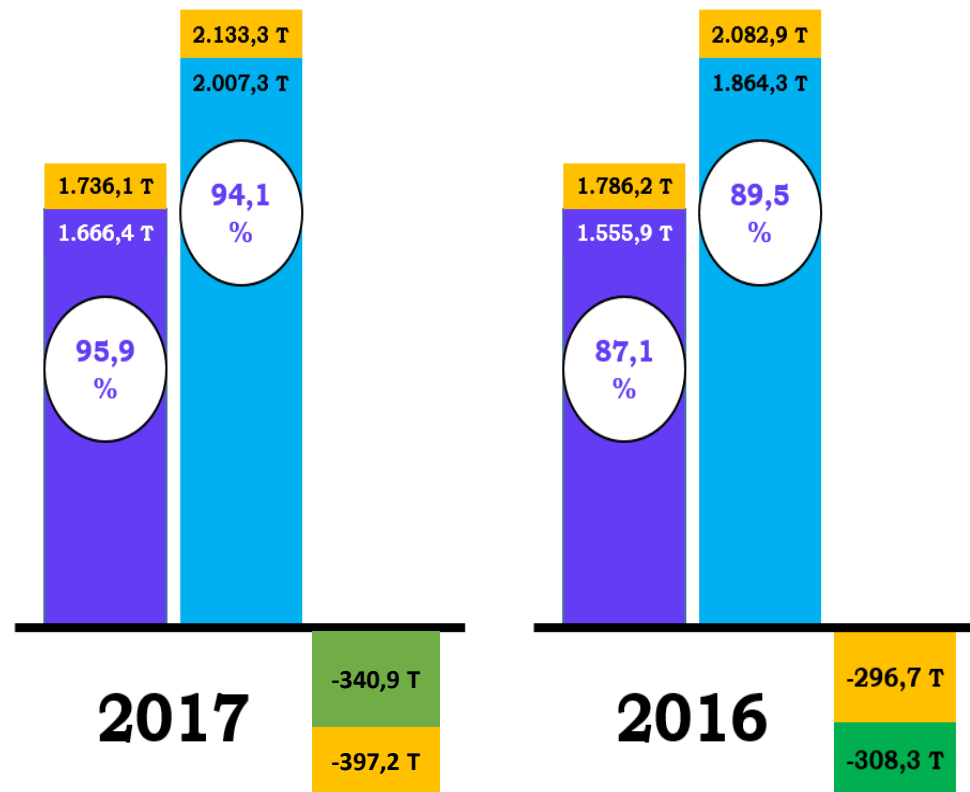


LAPORAN REALISASI APBN (LRA)

LKPP TAHUN 2017

REALISASI BELANJA

1. Belanja Rp2.007,3 T (94,1% dari APBN-P).
2. Belanja meningkat Rp143,1 T (7,7 % dari realisasi 2016).
3. Peningkatan belanja mencerminkan komitmen menjadikan APBN sebagai alat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Kualitas belanja ditunjukkan dengan capaian yang nyata.



DEFISIT

1. Defisit dapat dikendalikan pada tingkat 2,51% terhadap PDB.
2. Nilai defisit pada kisaran aman dan lebih rendah dari defisit indikatif dalam UU APBN-P sebesar 2,92%.



Keterangan:

- PDB tahun 2017 = Rp13.588,8 T
- Target Defisit dalam APBN-P terhadap PDB = 2,92%
- Realisasi Defisit LRA terhadap PDB = 2,51%

LAPORAN REALISASI APBN (LRA)

LKPP TAHUN
2017

Total Realisasi Belanja Negara : **2.007,3 (94,1%)**

Transfer ke Daerah
dan Dana Desa

741,9

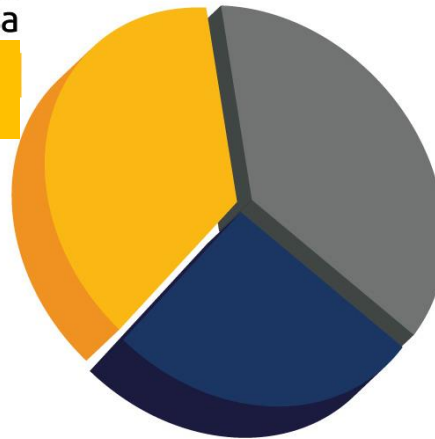
37%

Belanja K/L

868,2

43%

Blj. Pegawai : **312,7 (36%)**
Blj. Barang : **291,5 (34%)**
Blj. Modal : **208,7 (24%)**
Blj. Bansos : **55,3 (6%)**



Belanja Non K/L

397,2

20%

Program
Pengelolaan
Subsidi

166,4 (42%)

Program
Pengelolaan
Belanja Lainnya

8,8 (2%)

Program
Pengelolaan
Utang Negara

216,6 (54%)

Program
Pengelolaan
Hibah Negara

5,4 (2%)

**Proporsi
Belanja Negara**

(dalam Triliun)

LAPORAN PERUBAHAN SAL

LKPP TAHUN
2017

Dalam Triliun Rupiah

No	Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)
1	SAL Awal	113,19
2	Penggunaan SAL	-
3	SiLPA	25,64
4	Penyesuaian SAL	(0,48)
5	SAL Akhir	138,35

Ket:

SAL akhir tahun 2017 meningkat sebesar Rp25,16 T dari saldo SAL tahun 2016.

ASET

5.947,8 T



490,9 T (9%) dari 2016

KEWAJIBAN

4.407 T



517,1 T (13,3%) dari 2016

EKUITAS

1.540,8 T



26,1 T (1,7%) dari 2016

PENJELASAN NERACA:

1. Nilai aset belum termasuk hasil Revaluasi terhadap sekitar 40% aset Pemerintah.
2. Tujuan revaluasi agar aset mencerminkan nilai terkini dan hasil revaluasi tahun 2017 meningkatkan sebesar Rp1.874,3 T.
3. Revaluasi selesai pada tahun 2018, sehingga nilai aset setelah revaluasi disajikan pada LKPP Tahun 2018.
4. Rasio pinjaman terkendali pada 29,4% terhadap PDB, di bawah batasan dalam UU, sebesar 60 %.
5. Penurunan ekuitas dikarenakan tidak semua belanja menjadi aset yang dapat dikapitalisasi, seperti infrastruktur.
6. Belanja '*soft infrastructure*' meningkatkan kualitas SDM.
7. Pembangunan daerah yang dibiayai dari transfer ke daerah dan dana desa menghasilkan aset tetap yang dicatat sebagai aset Pemda

Dalam Triliun Rupiah

No	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1	Pendapatan Operasional	1.806,82	1.664,66
2	Beban Operasional	1.991,67	1.872,34
3	Surplus (Defisit) Keg.Operasional	(185,15)	(207,68)
4	Surplus (Defisit) Keg. Non Operasional	72,17	67,96
5	Pos Luar Biasa	-	-
6	Surplus (Defisit) LO	(112,98)	(139,72)

1. Defisit LO Rp112,98 T, merupakan defisit terkecil dalam tiga tahun terakhir
2. Komitmen Pemerintah: memperbaiki dan memperkuat pengelolaan APBN dan keuangan negara untuk menjaga fondasi perekonomian secara bertanggungjawab yang berdampak pada semakin kecilnya nilai defisit

LAPORAN ARUS KAS (LAK)

LKPP TAHUN 2017

Dalam Triliun Rupiah

Uraian	Arus Kas Masuk	Arus Kas Keluar	Arus Kas Bersih Tahun 2017 (Audited)
Aktivitas Operasi	1.666,2	1.798,2	(132,51)
Aktivitas Investasi	1,3	269,4	(268,12)
Aktivitas Pendanaan	783,4	357,1	426,3
Aktivitas Transitoris			9,4
Penggunaan SAL			-
Penyesuaian Pembukuan			(0,58)
Kenaikan (Penurunan) Kas			34,43

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi bernilai negatif

mencerminkan adanya upaya Pemerintah untuk melakukan investasi terutama untuk mendukung berbagai proyek pembangunan infrastruktur.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

LKPP TAHUN
2017

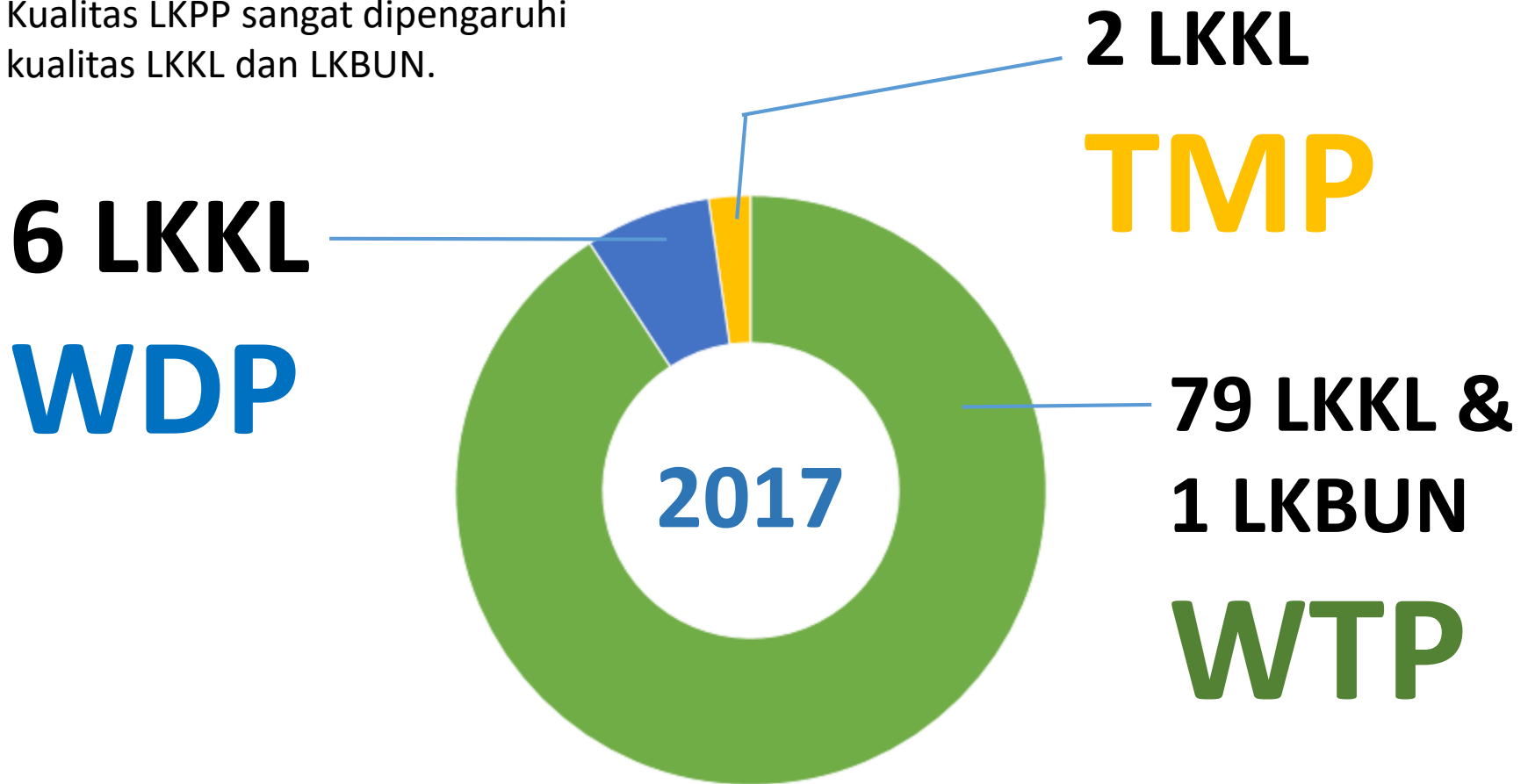
Dalam Triliun Rupiah

No	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1	Ekuitas Awal	1.566,93	1.669,79
2	Penyesuaian Ekuitas Awal	-	(1,53)
3	Ekuitas Awal Setelah Penyesuaian (1+2)	1.566,93	1.668,26
4	Surplus (Defisit) LO	(112,98)	(139,72)
5	Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	84,97	37,07
6	Transaksi Antar Entitas	0,18	(0,07)
7	Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas	1,68	1,39
8	Koreksi Karena Pencatatan Ganda	-	-
9	Kenaikan (Penurunan) Ekuitas (4+5+6+7+8)	(26,15)	(101,33)
10	Ekuitas Akhir	1.540,78	1.566,93

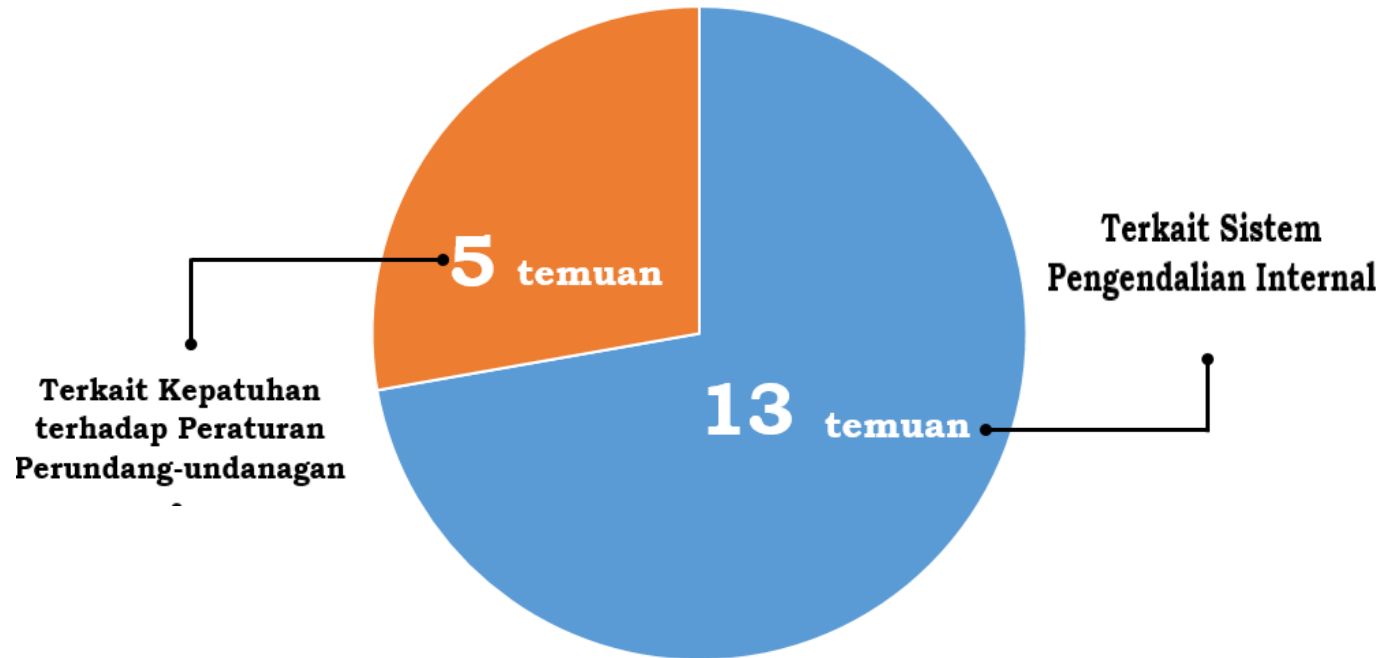
KUALITAS KONSOLIDASIAN LKPP 2017

LKPP ^{TAHUN} 2017

- $LKPP = \sum LKKL + LKBUN$.
- Kualitas LKPP sangat dipengaruhi kualitas LKKL dan LKBUN.



Capaian opini WTP LKKL **terbaik** sejak tahun 2006.



18 temuan SPI dan Kepatuhan tersebut
tidak mempengaruhi kewajaran
LKPP Tahun 2017.

1. Pemerintah telah menunjuk wakil Pemerintah dalam Panja Perumus Kesimpulan dan Panja Draf RUU.
2. Pemerintah mengharapkan kerja sama terus ditingkatkan, sehingga tugas DPR dan Pemerintah dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang disepakati.



TERIMA KASIH

SUSUNAN PANITIA KERJA PERUMUS KESIMPULAN

Koordinator :	Dirjen Perbendaharaan	
Wakil Koordinator :	Irjen Kementerian Keuangan	
Anggota :	1. Dirjen Kekayaan Negara; 2. Dirjen Pajak; 3. Dirjen Anggaran; 4. Direktur APK, DJPB; 5. Sekretaris DJBC,; 6. Inspektur III, Itjen Kemenkeu, 7. Direktur PKN, DJPB; 8. Direktur SITP, DJPB; 9. Direktur PNBPN, DJA; 10. Direktur PAPBN, DJA; 11. Direktur Anggaran Bid. Polhukam dan BA BUN, DJA; 12. Direktur BMN, DJKN; 13. Direktur KND, DJKN; 14. Direktur EAS, DJPPR;	15. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, DJP; 16. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen Kementerian Keuangan; 17. Kepala Pusat Kebijakan APBN, BKF; 18. Kepala PKEM, BKF; 19. Direktur PTNDP, DJPK; 20. Kasubdit PLKPP, Dit. APK; 21. Kasubdit APPKBUN, Dit. APK; 22. Kasubdit PSII, Dit. SITP; 23. Kasubdit SAPPK, Dit. PKN; 24. Kasubdit APPA, Dit. PA. 25. Kasubdit BMN IV, Dit. BMN;

SUSUNAN PANITIA KERJA

DRAFT RUU P2 APBN TA 2017

Koordinator :	Sekjen Kementerian Keuangan	
Wakil Koordinator :	Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	
Anggota :	1. Dirjen Bea dan Cukai; 2. Dirjen Perimbangan Keuangan; 3. Kepala BKF; 4. Sekretaris DJPB; 5. Kepala Biro Hukum, Setjen Kemenkeu; 6. Direktur PPS, DJBC; 7. Direktur PA, DJPB; 8. Direktur SP, DJPB; 9. Sekretaris DJKN; 10. Direktur SMI, DJPB; 11. Sekretaris DJP;	12. Kasubdit SA, Dit. APK; 13. Kasubdit BAIBUN, DJPB; 14. Kasubdit HPP, DJPB; 15. Kabag Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, dan PNB, Biro Hukum; 16. Kasubdit Aklap, Dit. EAS; 17. Kasubbag Hukum Anggaran, Biro Hukum